

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan Negara-negara lain, Indonesia berpegang teguh pada prinsip sistem politik luar Negeri yang bebas dan aktif, yaitu politik Negara yang mengandung kemerdekaan dan kedaulatan Negara serta berdasarkan pada kepentingan rakyat dan bertujuan untuk perdamaian dunia.

Dalam prakteknya, salah satu bentuk hubungan Indonesia dengan Negara lain adalah hubungan bilateral Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Timur-Tengah, seperti hubungan bilateral Indonesia dengan Mesir yang pada tahun 1947¹ terkait kesepakatan pembuatan perjanjian persahabatan diantara kedua Negara tersebut, hingga hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina yang sampai sekarang masih marak untuk diperbincangkan.

Palestina adalah bangsa yang sampai sekarang berusaha untuk mendapatkan kedaulatan di dunia Internasional, konflik agama dan politik yang terjadi selama bertahun-tahun antara Israel dengan warga Palestina telah menjadikan Palestina terpecah

¹ Sunario, *Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas*, Penerbit Endang, Jakarta, Hal. 19

menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu: wilayah Tepi Barat (*West Bank*) yang dikuasai oleh partai Fatah dan wilayah Jalur Gaza (*Gaza Strip*) yang dikuasai oleh partai Hamas. Pada 27 Desember 2008, konflik antara Israel dengan warga Palestina kembali terjadi di Jalur Gaza, ini merupakan titik puncak dari gencatan senjata yang telah terjadi selama 6 bulan sebelumnya, setelah Israel memutus suplay gas dan listrik bagi warga Palestina di jalur Gaza. Dalam agresi kali ini, Israel melakukan serangan udara atau *Operation Cast Lead* sebagai balasan dari serangan roket Hamas. Dari agresi yang berlangsung selama 22 hari (gencatan sepihak oleh Israel pada 17 Januari 2009 yang menandai akhir konflik) lebih dari 6.800 warga Palestina menjadi korban.

Indonesia, yang merupakan Negara Dunia Ketiga berpenduduk mayoritas muslim mempunyai kesamaan pandangan dalam Agama dengan Palestina yaitu Islam, selain hal itu, hubungan yang cukup baik antara Indonesia dengan Palestina juga terjalin pada ranah politik. Berdasarkan sifat politik internasional Indonesia yang bebas dan aktif yang bertujuan untuk perdamaian dunia dan kesamaan beberapa hal tersebut, mendorong Indonesia untuk melakukan langkah inisiatif guna berperan dalam membantu penanganan korban agresi dan proses pencapaian perdamaian antara Palestina dengan Israel. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengiriman bantuan obat-obatan dan tim dokter Indonesia untuk merawat korban agresi hingga upaya diplomasi Indonesia di Organisasi Internasional PBB untuk membela warga Palestina seperti dengan mendesak

PBB agar membuat suatu pernyataan yang mengecam dan segera membuat resolusi terkait agresi Israel tersebut.

Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina sudah lama terjalin, yaitu sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan, Palestina merupakan bangsa pertama di kawasan Timur-Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini. Berkat jasa dari Amin inilah, kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya pada masyarakat Internasional². Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina semakin baik setelah ditempatkannya Duta Besar Palestina untuk Indonesia pada 13 September 1993.

Dalam agresi Israel ke Jalur Gaza pada tanggal 27 Desember 2008, sesungguhnya Indonesia bisa lebih berperan secara aktif lagi untuk membantu penyelesaian konflik di Jalur Gaza, akan tetapi peran Amerika dalam agresi tersebut menjadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah SBY. Hal ini terbukti dengan kuatnya lobi Yahudi melalui salah satu Organisasi lobi Yahudi yang bernama AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*) pada pemerintahan Amerika Serikat sehingga karena kuatnya lobi Yahudi tersebut mengakibatkan kebijakan pemerintah Amerika harus melalui persetujuan Yahudi. Oleh karena itu, Barrack Obama pada masa kampanye Presiden tanggal 4 Juni 2008 pernah mengatakan bahwa “mereka yang mengancam

² Shofwan Al-Banna Choiruzzad, *Indonesia-Palestina*, <http://muftialy.wordpress.com>, 09/01/2009.

Israel berarti mengancam kita. Israel selalu saja menghadapi ancaman ini pertama kali, dan saya akan membawa komitmen keamanan Israel ke Gedung Putih. Awalnya adalah memastikan kualitas militer Israel. Saya akan memastikan Israel dapat mempertahankan diri dari ancaman yang datang dari Gaza hingga Teheran. Kerjasama pertahanan antara Israel dan Amerika adalah modal kesuksesan dan harus diperdalam. Sebagai Presiden, saya akan menyediakan US \$30 Miliar untuk mengawal Israel pada dekade berikutnya, penanaman modal bagi keamanan Israel tidak terikat oleh bangsa lain”³.

Hal diatas perlu dipertimbangkan karena pada kenyataannya, Indonesia mempunyai keterikatan hubungan dengan Amerika, seperti keterikatan ekonomi berupa peminjaman modal melalui IMF guna penanganan krisis di Tanah Air yang lambat laun sekarang merupakan bentuk ketergantungan Indonesia terhadap Amerika.

Agresi Israel ke Jalur Gaza juga mendatangkan berbagai reaksi di Tanah Air, seperti aksi yang dihadiri lebih dari 30 Ribu massa *Hizbut Tahrir* di Jakarta yang menuntut diantaranya agar pemerintahan SBY tidak hanya mengecam tindakan brutal Israel, tetapi membantu warga Palestina di Jalur Gaza dengan mengirimkan pasukan TNI untuk berperang melawan tentara Israel⁴. Di Bandung, aksi aktivis Islam juga menuntut agar

³ *Demokrat dan Israel*, Majalah Islam *Sabili*, 12/03/2009, Hal.51

⁴ Pendi, *Lebih dari 30 Ribu Massa HTI Gelar Aksi Umat Ganyang Israel*, <http://eramuslim.com>, 05/01/2009.

pemerintahan SBY segera memutus hubungan diplomatik dengan Amerika jika Presiden Obama masih berstandar ganda dalam menangani konflik Palestina-Israel⁵.

Adanya tekanan dari dalam Negeri agar pemerintah segera bersikap dan mengambil kebijakan terkait agresi Israel serta pentingnya menjaga hubungan pemerintahan Indonesia dengan Amerika adalah dua hal yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah, disatu sisi pemerintah harus merealisasikan tuntutan masyarakat agar stabilitas nasional tetap terjaga dan citra pemerintah tidak dinilai lamban dalam penanganan suatu masalah, di sisi lain pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan Amerika, sehingga tidak mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu, **“Bagaimana Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina pasca agresi Israel ke Jalur Gaza pada 27 Desember 2008”**

C. Landasan Teoritik

Dalam studi ilmu-ilmu sosial terutama ilmu hubungan internasional, teori menjadi sebuah alat analisa utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi. Teori juga dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan atau

⁵ Ant, *Setengah Juta Aktivis Islam Kutuk Israel di Gedung Sate*, <http://SURYAOnline.com>, 20/01/2009

persepsi tentang apa yang terjadi, sehingga berteori dapat diartikan pekerjaan yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.⁶

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan teori sebagai berikut :

1. Politik Luar Negeri

Dalam kamus Hubungan Internasional, politik Luar Negeri diartikan sebagai :

*A strategy or plan course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.*⁷

Konsep *National interest* digunakan sebagai dasar guna menjelaskan perilaku Negara dalam politik internasionalnya⁸. Selain itu, politik luar Negeri juga mengandung tindakan yang merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mendukung atau mengubah perilaku Negara lain. Hal ini merupakan tanda dimulainya proses politik internasional.

Lebih spesifik lagi, politik luar Negeri diartikan sebagai iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh suatu Negara

⁶ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hal.185.

⁷ Jack C. Plano and Roy Olto, *The International Relation Dictionary*, Halt Richart and Winstone Inc, USA 1969

⁸ Plano, *Op Cit*, Hal 391

dalam hubungannya dengan Negara-negara lain atau kegiatannya dalam Organisasi-organisasi Internasional maupun Regional.⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, politik luar Negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi *national interestnya*, kepentingan nasional ini dapat melukiskan aspirasi suatu Negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual dan rencana-rencana yang dituju oleh suatu Negara.

Dalam kaitannya dengan Agresi Israel ke Jalur Gaza pada 27 Desember 2008, Indonesia melalui pemerintah mengecam dan mengutuk tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Sedangkan dari agresi tersebut, kepentingan Indonesia lewat politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif adalah secara konsisten membela dan mendukung perjuangan warga Palestina demi terwujudnya perdamaian di bumi Palestina dan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat. Oleh sebab itulah, segala daya dan upaya dilakukan pemerintahan Indonesia untuk mencapai *interest* tersebut, baik melalui usaha-usaha diplomasi pada Organisasi Internasional semisal PBB sampai dukungan dalam bentuk bantuan kemanusiaan.

⁹ Supri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989.

3. Diplomasi

Menurut S.L. Roy, Kata *Diplomasi* diyakini berasal dari kata Yunani *Diploun* yang berarti *Melipat*. Menurut Nicholson, pada masa kekaisaran Romawi semua paspor yang melewati jalan milik Negara dan surat-surat jalan dicetak dalam piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas, surat jalan ini disebut *Diplomas*. Selanjutnya kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang memberi hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing diluar bangsa Romawi. Karena perjanjian-perjanjian ini semakin bertumpuk, arsip kekaisaran menjadi beban dengan dokumen-dokumen kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dilipat dan diberikan dalam cara khusus.

Oleh karena itu dirasa perlu untuk mempekerjakan seseorang yang terlatih untuk mengindeks, mengurai dan memeliharanya. Isi surat resmi Negara yang dikumpulkan, disimpan diarsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal pada Jaman Pertengahan sebagai *Diplomatious* atau *Diplomatique*. Siapapun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik *Res Diplomatique* atau *Bisnis diplomatik*. Dari peristiwa ini lama kelamaan kata *Diplomasi* menjadi

dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional, dan siapapun yang ikut mengaturnya dianggap Diplomat.¹⁰

Secara definisi, dalam kamus The Oxford English Dictionary, Diplomasi diartikan sebagai : “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat”¹¹.

Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain”¹².

Adapun diantara tipe Diplomasi yang dapat diterapkan Indonesia terkait konflik yang terjadi di Jalur Gaza adalah Diplomasi Konperensi.

Diplomasi Konperensi pertama kali muncul pada awal abad dua puluh, Yaitu pada perang dunia pertama. Pada awalnya, tujuan awal kemunculan Diplomasi Konperensi ini adalah pembentukan sebuah Konfrensi untuk membicarakan masalah-masalah mendesak tentang strategi dan politik demi keberhasilan perang, seperti membicarakan tentang pelaksanaan perang gabungan, pembelian material perang dan sebagainya.

¹⁰ S.L. Roy, *Diplomacy* (edisi Indonesia), Yogyakarta, 1990. Hal 2.

¹¹ *Ibid*, Hal 3

¹² *Ibid*, Hal 4

Sejalan dengan waktu, Konfrensi ini berkembang menjadi lembaga-lembaga yang lebih dari sekedar mekanisme koordinasi masa perang. Pasca PD I, Diplomasi Konperensi ini berwujud LBB (yang sekarang berubah menjadi PBB), dimana para wakil Negara-negara membicarakan kepentingan yang saling menguntungkan atau bahkan saling bertentangan, dan berusaha memecahkan melalui perundingan. Sebagaimana Sir Thomas Hovet Jr mengatakan “yang mendasar bagi jenis diplomasi ini adalah keyakinan akan pentingnya pendapat umum Dunia, dengan memfokuskan pendapat umum suatu keadaan, diperkirakan perhatian umum itu akan mampu mendinginkan situasi dan mencegah rentetan peristiwa yang bisa mengarah kepada konflik”¹³

Lewat jalan diplomasi ini, Indonesia juga berupaya untuk membantu serta berupaya mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza. Hal ini terbukti dari keikutsertaan Indonesia dalam *Annapolis Conference*, sebuah konfrensi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, pada akhir Desember 2008 lalu. Indonesia juga diundang pada Konferensi Paris guna memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina, dan atas inisiatif sendiri, Indonesia mengadakan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine*. Tidak hanya itu, ketika Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1860 mengenai Situasi di Jalur Gaza telah ditetapkan, Indonesia sepenuhnya mendukung Resolusi

¹³ *Ibid*, Hal. 112

tersebut, yang disinyalir sebagai jalan utama untuk mendatangkan perdamaian di Jalur Gaza.

Sebagai bentuk Indonesia dalam membantu perjuangan rakyat Palestina secara konsisten, pada Sidang Luar Biasa (*Extraordinary Session*) IPU yang diselenggarakan pada 29 – 30 Januari 2009 lalu di Markas Besar IPU, Jenewa, Swiss, Indonesia mendesak beberapa hal, baik kepada PBB maupun kepada Israel. Diantaranya :

- a. Mendesak Inter-Parliamentary Union (IPU) agar mengirim Komite Pencari Fakta ke Jalur Gaza. Tujuannya untuk memantau jalannya resolusi gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, membantu para anggota Parlemen Palestina.
- b. Mendesak supaya *Executive Committee* secara tekstual maupun kontekstual membuat pernyataan yang mengutuk serangan militer Israel di Jalur Gaza yang telah mengakibatkan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Palestina.
- c. Mendesak agar Sekretaris Jenderal PBB menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM dan membentuk pengadilan internasional guna mengadili mereka yang dituduh melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang.
- d. Mendesak supaya Israel menghentikan blokade ekonomi di Jalur Gaza selama 18 bulan terakhir dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan internasional kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza.

- e. Mendesak agar Israel menanggung kerugian yang dialami oleh rakyat Palestina serta menghimbau bagi masyarakat internasional untuk memberikan bantuan guna tercapainya langkah rekonstruksi dan rehabilitasi di kawasan Jalur Gaza.
- f. Mendesak Israel agar membebaskan seluruh anggota Parlemen Palestina yang telah ditahannya secara semena-mena dan menggarisbawahi pentingnya melibatkan HAMAS dalam setiap proses perdamaian dan negosiasi.¹⁴

Indonesia juga memanfaatkan forum Konferensi Rekonstruksi Gaza yang digelar di Sharm el-Sheikh Mesir pada tanggal 2-3 Maret 2009. Dalam Konferensi tersebut dibahas tentang rencana rekonstruksi diantaranya berupa pembersihan Gaza dari puing-puing bangunan, mengidentifikasi dan menjinakkan bom yang tidak meledak, pembangunan kembali sanitasi air bersih dan perintah terhadap Israel untuk membuka semua blokade terhadap Gaza tanpa syarat.

D. Hipotesa

Dari pembahasan diatas dapat ditarik hipotesa bahwa Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Agresi Israel ke Jalur Gaza Pada 27 Desember 2008 adalah lebih memilih langkah diplomasi yaitu dengan meningkatkan hubungan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

¹⁴ Abdillah Toha, *Indonesia Desak Inter-Parliamentary Union (IPU) kirim Komite Pencari Fakta ke Jalur Gaza*, <http://deplu.go.id>, 3/01/2009.

Hubungan yang bersifat sosial dan kemanusiaan antara Indonesia dengan Palestina itu terwujud diantaranya sikap Indonesia melakukan seruan moral dan mengecam agresi yang dilakukan oleh Israel, mengirimkan bantuan senilai lebih dari 22,2 Milyar yang terwujud dalam bentuk obat-obatan, alat-alat medis, sarana dan prasarana medis, serta kendaraan medis. Disamping dua hal tersebut, Indonesia juga mengirimkan para diplomatnya di berbagai konferensi internasional untuk ikut andil dalam penyelesaian dan perdamaian di Palestina, diantaranya keikutsertaan Indonesia dalam perumusan resolusi DK PBB terkait situasi di Jalur Gaza, keikutsertaan Indonesia dalam sidang IPU yang diselenggarakan di Jenewa serta keikutsertaan Indonesia dalam konferensi rekonstruksi Gaza yang diselenggarakan di Mesir pada tanggal 2 Maret 2009.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian pada skripsi ini adalah sikap nyata Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina yang dimulai pada tanggal 29 Desember 2008 atau 2 hari pasca agresi Israel hingga tanggal 3 Maret ketika berakhirnya konferensi rekonstruksi Gaza yang diselenggarakan di Mesir. Namun tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mencantumkan peristiwa-peristiwa yang terkait di selain waktu tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini yaitu dengan mencari data dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, journal-journal ilmiah, majalah-

majalah, media cetak, media elektronik, dan literatur lainnya yang dapat mendukung pembuatan tulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari Bab ke Bab. *Bab I* Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, batasan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. *Bab II* Merupakan uraian tentang dinamika Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Timur-Tengah. *Bab III* Merupakan uraian tentang agresi Israel ke Jalur Gaza pada 27 Desember 2008. *Bab IV* Merupakan uraian tentang Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina pasca agresi Israel. Dan *Bab V* Kesimpulan.